

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan dalam pemberian program bebas bersyarat di Lapas Kelas IIA Padang didasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018, dimana pertimbangan dalam pelaksanaan bebas bersyarat diberikan oleh Kepala Lapas Kelas IIA Padang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pertimbangan pemberian program bebas bersyarat didasarkan pada terpenuhinya syarat substantif dan syarat administratif. Apabila syarat substantif dan administratif di atas tidak terpenuhi maka program pembinaan melalui bebas bersyarat tidak dapat diberikan.
2. Pelaksanaan bebas bersyarat dalam kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku tentang program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya pembinaan melalui program bebas bersyarat. Berdasarkan aturan yang ada tersebut Lapas Kelas IIA Padang melaksanakan program bebas bersyarat sebagai tahap akhir pembinaan dalam upaya proses integrasi narapidana untuk masuk kembali ke masyarakat. Program bebas bersyarat ini dilaksanakan setelah melalui tahap pengamatan dan pembinaan yang berkelanjutan di Lapas Kelas IIA Padang mulai dari

masa penahanan sampai dengan masa pelaksanaan program bebas bersyarat.

3. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bebas bersyarat di Lapas Kelas IIA Padang adalah terlambatnya petikan putusan dari lembaga peradilan baik itu ditingkat Mahkamah Agung, terlambatnya pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum, penjamin yang tidak sesuai dengan aturan, tidak adanya keluarga sebagai penjamin, penjamin yang berada di luar kota, proses Pembebasan Bersyarat usulannya sampai ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta, sulitnya proses pengurusan *Justice Collaborator* (JC) bagi narapidana yang dikenai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu antara lain:

1. Agar pihak Lapas Kelas IIA Padang dapat mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar pengeluaran surat keputusan tentang bebas bersyarat tepat pada waktunya atau bahkan dengan melimpahkan kewenangan kepada pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menandatangani surat

keputusan tentang bebas bersyarat tanpa perlu adanya persetujuan khusus dan hanya cukup dengan pemberitahuan.

2. Agar pihak Lapas Kelas IIA Padang dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan program bebas bersyarat terutama dalam mempermudah proses pelaksanaan bebas bersyarat bagi narapidana yang mengalami beberapa kendala.
3. Agar pihak Lapas Kelas IIA Padang lebih mengintensifkan permintaan kutipan putusan terhadap pengadilan dan surat eksekusi dari kejaksaan agar penataan program pembinaan bagi narapidana dapat terencana dan terlaksana dengan baik.

